

# Strategi Gerakan Pariwisata Mangrove dalam Mewujudkan Perilaku Ekosentrisme

*by* Komang Jaka Ferdian

**Submission date:** 10-Mar-2021 10:28PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1529345463

**File name:** 243-Article\_Text-1821-1-4-20201113\_Revisi.docx (3.79M)

**Word count:** 4474

**Character count:** 31265



# Strategi Gerakan Pariwisata Mangrove dalam Mewujudkan Perilaku Ekosentrisme

## Abstrak

Rusaknya ekologis pesisir bangka memaksa masyarakat untuk melakukan gerakan penyelamatan lingkungan guna membenahi ekologi lautnya. Gerakan lingkungan yang dilakukan oleh Kelompok HKM Gempa 01 di Desa Kurau Barat merupakan aktivitas ekosentrisme yang menjadi anti tesis dari perilaku antroposentrisme yang sudah merusak lingkungan hidup di Kepulauan Bangka Belitung. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui Strategi Gerakan Pariwisata Mangrove berbasis Ekosentrisme. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan teknik *purposive sampling*, dan dokumen sedangkan teknik analisis menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Kelompok HKM Gempa 01 mampu menggerakkan tiga Stakeholders yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Wisatawan untuk turut serta dalam pengelolaan kawasan Mangrove berbasis perilaku ekosentrisme. Keberhasilan pengelolaan kawasan tersebut membentuk Strategi gerakan yang mampu menekan (*Pressure*), mengarahkan (*Steering*) tiga *Stakeholders* untuk merubah (*Transforming*) perilaku antroposentrisme menuju perilaku ekosentrisme dalam pengelolaan kawasan Mangrove Munjang Kurau.

*Keywords:* Gerakan; Lingkungan; Ekosentrisme

## 1. Latar Belakang

Pariwisata dalam pengertian sederhana dikatakan sebagai sarana bagi seseorang atau kelompok untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan tanpa adanya paksaan dan memiliki sifat sementara. Pada dasarnya pariwisata menurut Gunn & Turgut (2002) memiliki tujuan diantaranya *Pertama*, pariwisata harus memberikan kepuasan tersendiri bagi pengunjung. *Kedua*, pariwisata harus menghadirkan dampak ekonomi maupun menuju keberhasilan usaha. *Ketiga*, pariwisata harus menghadirkan sumber daya berkelanjutan. *Keempat*, pariwisata harus menciptakan harmonisasi masyarakat dan wilayah. Atas dasar tujuan tersebut maka pariwisata harus memberikan manfaat baik bagi masyarakat, pengunjung serta mampu menciptakan perlindungan lingkungan hidup.

Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Potensi tersebut ditandatangan dengan masuknya empat event wisata dan budaya Kepulauan Bangka Belitung dalam *Calendar of Event (CoE) Wonderful Indonesia 2020*. Keempat event tersebut diantaranya *Toboali City on Fire Season*, *Festival Tanjung Kelayang*, *Sungailiat Triathlon*, dan *Jelajah Pesona Jalur Rempah*. Alasan *CoE Wonderful Indonesia 2020* memilih keempat event tersebut karena memenuhi tiga aspek utama yaitu *Media Value*, *Cultral Creatives*, dan *CEO Commitment* sebagai salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata (kompas.com, 2020).

*CEO Commitment* merupakan bentuk komitmen dari para kepala daerah untuk mengembangkan pariwisata daerahnya. Bentuk komitmen yang perlu dilakukan oleh para kepala daerah yaitu adanya pengalokasian anggaran pada sektor pariwisata.



Pengalokasian anggaran tersebut dapat tercermin dari dokumen anggaran pedapatan dan Belanja Daerah (kompas.com, 2020).

Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung memiliki komitmen tinggi untuk mengimplementasikan CEO Commitment. Implementasi CEO Commitment ditandai dengan masuknya sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selain itu, respon keseriusan pemerintah yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016-2025 (Megawandi, 2020; Valeriani, 2010).

Langkah Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung dinilai tepat dalam meletakkan Sektor Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan RPJMD dan RPJMP. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat potensi sumber daya alam pesisir yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata pesisir tersedia cukup banyak. Potensi pariwisata pesisir tersebar secara merata di Kepulauan Bangka Belitung misalnya, potensi lokasi snorkling di Pantai Turun Aban Kabupaten Bangka; Pemandangan alam Pesisir di Pulau Panjang dan Pulau Tinggi Bangka Selatan; Wisata Bahari, Resort, Pemancingan, dan taman rekreasi pantai di Kabupaten Belitung; serta wisata alam mangrove (Kantona, Adi, & Kurniawan, 2016; Andini, Guskarnali, & Irvani, 2019; Husin, Silalahi, Kartono, & Indra, 2001).

Keragaman potensi pariwisata serta optimis pemerintah untuk meningkatkan potensi pariwisata menemui beberapa permasalahan baik dari segi kunjungan wisatawan maupun dari aktifitas kerusakan lingkungan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut merupakan data Badan Pusat Statistik Bangka Belitung tahun 2012-2019 yang menggambarkan peningkatan dan penurunan jumlah wisatawan di Bangka Belitung yaitu:



Gambar 1 Total Wisatawan di Kepulauan Bangka Belitung

Dari grafik di atas, Badan Pusat Statistik Bangka Belitung merilis data terkait peningkatan dan penurunan wisatawan. Pada data di atas dapat terlihat bahwasannya tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2016-2019 tingkat kunjungan wisatawan mengalami penurunan drastis sebanyak -44%. Penurunan tingkat kunjungan wisatawan tentu saja dapat menyebabkan tidak tercapainya rencana pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016-2025 yang menargetkan terjadinya peningkatan laju wisatawan dari luar Bangka Belitung sebanyak 6%.

Selain dari jumlah kunjungan, komitmen pemerintah dalam mengembangkan pariwisata bertolak belakang dengan tindakan pemberian izin pertambangan timah yang dapat merusak lingkungan. Pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 1,1 juta hektar kepada pengelola yang mencakup areal darat maupun laut. Ujungnya aktifitas penambangan berdampak pada kerusakan lingkungan yang masif dimana lumpur akibat penambangan mengancam ekologis laut di Kepulauan Bangka Belitung dan mengancam kegiatan pariwisata (Walhi, 2018).

Ancaman kerusakan ekologis laut tentunya dapat menimbulkan bencana ekologis serta dapat mengancam perekonomian masyarakat daerah pesisir. Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung menyatakan lumpur yang dihasilkan oleh aktivitas tambang menyebabkan sedimentasi dan menutupi terumbu karang yang berakibat pada kematian habitat terumbu karang sebagai sumber makanan makhluk hidup laut. Selain itu dampak lumpur yang mengotori laut dapat terbawa ombak sejauh 30-40 km (Ferdiansyah, 2019). Kerusakan ekologis laut lainnya dari aktifitas pertambangan menimbulkan keruhnya air laut di bibir pantai. Berdasarkan hasil penelitian, keruhnya air laut di bibir pantai Bangka Belitung terkandung logam berat seperti Timbal, Kadmium dan Kromium. Hal tersebut menandakan bahwasannya air laut di pesisir Bangka Belitung sudah dikategorikan tercemar. (Kurniawan, Supriharyono, & Sasongko, 2014; Wahyuni H. , 2013).

Masifnya kerusakan ekologis laut di Kepulauan Bangka Belitung merupakan dampak dari prilaku antroposentrisme. Prilaku antroposentrisme menurut Sonny Keraf (2010) dapat dijelaskan sebagai bentuk tindakan manusia sebagai pusat dari sistem yang tidak memberikan nilai moral kepada lingkungan sehingga manusia bertindak destruktif kepada lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Prilaku antroposentrisme dari aktifitas pertambangan di Bangka Belitung mengakibatkan kerusakan ekologis laut. Hal tersebut ditandai dengan munculnya teknologi kapal keruk dan kapal hisap sebagai alat penambang timah yang memiliki sifat merusak dasar laut. Rusaknya ekologis laut Bangka memaksa masyarakat untuk memmbenahi ekologis lautnya dengan membentuk gerakan lingkungan. Gerakan ini dilakukan dengan merevitalisasi kawasan mangrove di Desa Kurau Barat. Aktivitas ekosentrisme sebagai respon lingkungan di Desa Kurau Barat ini merupakan anti tesis dari prilaku antroposentrisme yang jamak ditemukan dalam pengelolaan sumber daya alam dan efeknya telah merusak lingkungan hidup di Kepulauan Bangka Belitung.

Prilaku ekosentrisme menurut Sonny Keraf (2010) yaitu anti tesis dari kemunculan prilaku antroposentrisme. Dengan kata lain, prilaku ekosentrisme merupakan bentuk kesadaran manusia akan adanya kerusakan lingkungan sehingga memicu manusia untuk memberikan nilai moralitas kepada makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Oleh karena itu, Manusia berdasarkan pandangan ekosentrisme harus dapat hidup berdampingan dengan lingkungannya sehingga akan membentuk pola interaksi saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Atas dasar penjelasan permasalahan di atas, kajian tentang Strategi Gerakan Pariwisata Mangrove Munjang Kurau dalam Mewujudkan Prilaku Ekosentrisme menarik untuk dikaji. Untuk itu, penelitian ini akan mencoba menguraikan bagaimana Strategi Gerakan Pariwisata Mangrove Munjang Kurau dalam Mewujudkan Prilaku Ekosentrisme.

## 2. Tinjauan Pustaka

Gerakan sosial dilakukan dalam bentuk kolektif yang berisi sekelompok orang yang pada intinya memiliki sebuah tujuan atau cita-cita bersama yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas. Adapun kata kunci penting dalam menjelaskan sebuah gerakan sosial menurut Tarrow (1998) yaitu adanya tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas sosial dan interaksi yang berkelanjutan. Gerakan sosial menurut Wilson (1973) menekankan cara-cara yang tidak melembaga dan tujuannya bukan untuk memperoleh posisi kekuasaan. Adapun empat karakteristik dalam gerakan sosial menurut Della-Porta dan Diani (1999) yaitu sebagai jaringan interaksi informal, perasaan dan solidaritas bersama, konflik sebagai sebuah fokus kolektif serta mengedepankan bentuk protes.

Pariwisata berkelanjutan menjelaskan bahwa pariwisata harus memenuhi dua syarat utama yaitu dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang serta tidak merusak alam dan budaya masyarakat setempat agar dapat diwariskan pada generasi penerus. Pariwisata berkelanjutan karenanya harus menjunjung tinggi sikap atau etika ketika mengunjungi tempat wisata yaitu bertanggung jawab sehingga tidak mengakibatkan kerusakan alam dan budaya daerah yang dikunjungi serta perlunya sikap menghormati adat istiadat budaya penduduk daerah tempat wisata (Nurhidayati, 2015).

Gerakan sosial dan pariwisata saat ini tengah berkompromi untuk menghasilkan berbagai produk kesejahteraan kolektif untuk menggeser paradigma pariwisata yang dikelola oleh industri. Adapun keberlangsungan gerakan sosial pariwisata berkelanjutan dalam mencapai tujuan menyasar kepada tiga fokus utama yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Wisatawan. Penguatan ketiganya perlu dilakukan untuk menjaga komitmen bersama dalam aktivitas pariwisata berkelanjutan. Gerakan Pariwisata membutuhkan adanya legitimasi dari Pemerintah sebagai bentuk komitmen bersama dalam penentuan kebijakan publik. Pemerintah perlu mengedepankan perlindungan, pengawasan serta kontrol dalam pelaksanaan Pariwisata berkelanjutan (Arfan, Umar, & Fauzi, 2017). Pemerintah juga setidaknya perlu memberikan bantuan kepada gerakan pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata. Tanpa adanya peran pemerintah, gerakan sosial hanya akan fokus pada satu potensi saja dalam kawasan wisata yang menyimpan berbagai potensi seperti layaknya pengembangan wilayah pesisir di kabupaten Tangerang yang hanya fokus pada potensi pantainya saja (Fadli & Nurlukman, 2018).

Gerakan Pariwisata berkelanjutan selain perlu dukungan pemerintah, juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Pariwisata berbasis gerakan setidaknya perlu membentuk kelompok masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya. Sebut saja pariwisata mangrove yang memerlukan adanya perawatan, pembibitan dan penanaman sehingga lingkungannya tetap terjaga (Martuti, Susilowati, Sidiq, & Mutatari, 2018). Terjaganya wilayah pesisir yang dilaksanakan secara kolektif akan memberikan dampak positif terutama kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya seperti biota laut, bahan kerajinan tangan, berkurangnya bencana seperti abrasi dan lain-lain.

Gerakan Pariwisata berkelanjutan juga harus memberikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawannya. Adapun pengalaman berkesan yang perlu ditonjolkan untuk pengunjung yaitu mencintai alam dan budaya saat berkunjung. Pengembangan wisata mangrove Wonorejo di Surabaya menonjolkan nilai-nilai konservasi,

rehabilitasi serta pemberdayaan kepada pengunjungnya (Wahyuni, Sulardiono, & Hendrarto, 2015). Sedangkan di Kabupaten Buleleng, wisatawan diberikan pengalaman snorkling dan edukasi menjaga terumbu karang (Citra, 2017).

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini, merupakan penelitian yang menggunakan metode atau jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dijelaskan oleh Creswell yaitu penelitian yang bersifat mengeksplor dan memahami makna individu ataupun kelompok dalam permasalahan kehidupan sosial (Creswell, 2009). Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Observasi ke tempat penelitian; Wawancara dengan teknik *purposive sample* dengan mewawancarai Ketua dan anggota Kelompok HKm Gempa 01, Pemerintah Desa, Serta wisatawan; dokumen data-data lapangan seperti profil kawasan wisata Mangrove Munjang Kurau, Peraturan terkait serta media massa. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi data yang menggabungkan data lapangan dengan teoritik sehingga memunculkan analisis untuk menjawab rumusan masalah.

### 4. Hasil Penelitian

Kelompok HKm Gempa (Gerakan Muda Pecinta Alam) 01 merupakan gerakan lingkungan yang bereaksi atas dasar Kerusakan lingkungan di Bangka Belitung akibat dari aktivitas tambang. Kelompok HKm Gempa 01 yang diinisiasi dan diketuai oleh Yasir mencahya menyelamatkan lingkungan dengan cara mengembangkan kawasan mangrove di Kabupaten Bangka Tengah tepatnya di Desa Kurau Barat. Gerakan penyelamatan lingkungan ini dinilai berhasil sejak kelahirannya pada tahun 2005.

Bahkan sejak 2005, upaya untuk merehabilitasi kawasan mangrove yang kini di kenal dengan Mangrove Munjang tersebut telah digalakan oleh kelompok HKm Gempa 01. Meskipun pada awalnya gerakan untuk merehabilitasi kawasan hutan ini masih dipandang sebagai aksi relawanisme untuk pelestarian lingkungan ditengah maraknya kerusakan ekosistem di Kawasan Munjang Kurau. Gerakan ini kemudian memperluas perlakuannya terhadap kawasan mangrove Kurau dengan melihatnya tidak semata-mata sebagai entitas yang harus dilestarikan tetapi juga perlu dikembangkan sekaligus dimanfaatkan.

Rentan waktu sejak aksi relawanisme guna mencegah kerusakan lingkungan sampai pada terbitnya beragam kebijakan mengenai pemanfaatan kawasan ini menggambarkan terjadinya pergeseran cara pandang Kelompok HKm Gempa 01 dalam melihat kawasan mangrove Kurau. Kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Kementrian Lingkungan Hidup maupun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi pintu masuk bagi gerakan ini memanfaatkan kawasan Mangrove Kurau tidak saja untuk motif pelestarian lingkungan tetapi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi darinya. Meskipun demikian, meluasnya perlakuan terhadap kawasan mangrove Kurau sebagai objek yang dapat dikelola untuk mengais keuntungan ekonomis tidak serta merta menyingkirkan ide pelestarian lingkungan terhadap kawasan ini. Aksi-aksi pelestarian lingkungan terus digalakan sehingga pada akhirnya gerakan ini dapat dikatakan berhasil dalam pengembangan pelestarian wilayah pesisir.

Keberhasilan yang dicapai dalam gerakan ini menurut Wijaya (2019) mampu menjaga keanekaragaman hayati, memunculkan beragam jenis mangrove yang tidak

dimiliki oleh daerah lain serta mampu menghadang abrasi dan ombak besar. Adapun keanekaragaman hayati serta berbagai jenis mangrove yang ada di kawasan munjang kurau dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 Keanekaragaman Hayati Mangrove Munjang Kurau

Gambar di atas merupakan bukti bahwasannya kawasan mangrove munjang kurau terjaga dan mampu menjadi ekosistem baru bagi makhluk hidup lain. Terjaganya kawasan Mangrove tidak lepas dari konsistensi Kelompok HKm Gempa 01 dalam hal pengelolaan. Keberhasilan pengelolaan kawasan Mangrove tersebut pada akhirnya memberi ruang bagi Kelompok HKm Gempa 01 untuk mengembangkan Pariwisata mangrove berwawasan Lingkungan yang diresmikan pada tahun 2017.

Aktivitas pengembangan pariwisata terus dilakukan dengan beragam kegiatan semisal, pembibitan beragam spesies mangrove, serta konservasi (Dwi Saputra, 2019) menunjukkan bahwa pergeseran cara pandang terhadap Mangrove Kurau dari objek yang harus dilestarikan ke objek yang bisa mendatangkan manfaat secara ekonomi tidak mereduksi upaya-upaya pelestarian lingkungan yang merupakan ide awal gerakan pengelolaan kawasan tersebut. Adapun upaya pelestarian tetap dijalankan oleh Kelompok HKm Gempa 01 dapat dilihat dari terbentuknya Jalinan kerjasama dengan pemerintah baik daerah maupun Kementerian terkait menjadi semakin intens terutama setelah terbitnya kebijakan mengenai pemanfaatan kawasan kurau untuk dikelola oleh Kelompok HKm Gempa 01. Tindakan pelestarian, dalam hal ini Kelompok HKm Gempa 01 mencoba meminimalisir akses masyarakat untuk masuk kawasan agar tidak terjadi perambahan. Pelestarian juga menitik beratkan pada pemberian edukasi lingkungan kepada para wisatawan.

Ketiga upaya yang telah dijelaskan tersebut setidaknya berdampak pada keberhasilan pengelolaan kawasan mangrove sebagai pariwisata berwawasan pelestarian lingkungan. Keberhasilan pengelolaan kawasan mangrove oleh Kelompok HKm Gempa 01 ditunjukkan oleh kemampuannya mengarahkan tiga *stakeholders* yaitu Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Masyarakat sebagai penerima manfaat dan wisatawan sebagai objek dalam pemberian pendidikan lingkungan. Berikut merupakan peran dan fungsi *stakeholders* yang diarahkan oleh Kelompok HKm Gempa 01 untuk mencapai paradigma ekosentrisme dalam pengembangan pariwisata Mangrove yaitu:

- 1) Kelompok HKm Gempa 01 Menekan Pemerintah dalam Pengembangan mangrove

Gerakan yang dilakukan oleh HKM Gempa 01 secara konsisten sejak 2004 membutuhkan dasar legalitas untuk mengelola kawasan mangrove hingga menjadi destinasi pariwisata. Menurut Ketua HKM Gempa 01, hal ini dinilai penting agar agenda setting yang telah terbentuk oleh kelompok memiliki dasar hukum tetap. Atas dasar tersebut Gerakan ini mencoba mendorong pemerintah untuk menetapkan areal kawasan hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Bangka Tengah (wawancara dengan ketua kelompok HKM Gempa 01 pada 21 Agustus 2020).

Pada tanggal 2 September 2015, perjuangan kelompok membuahkan hasil. Pemerintah pada akhirnya memberi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) di Kabupaten Bangka Tengah. Izin tersebut dituangkan pada Surat Keputusan No. 358/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan 1.057 Ha pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Produksi Tetap di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Ketua HKM Gempa 01, keputusan tersebut memberikan ruang bagi mereka untuk mendorong kembali pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan areal luasan tata kelola hutan (wawancara dengan ketua kelompok HKM Gempa 01 pada 21 Agustus 2020). Tepat pada 29 Februari 2016, Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/209/DISHUT/2016 menetapkan pengelolaan konservasi seluas 213 Ha dikuasai oleh HKM Gempa 01 selama 35 tahun. Atas dasar kedua keputusan tersebut, kelompok HKM telah mendapatkan hak penuh untuk mengelola Mangrove Munjang Kurau.

Hak penuh atas pengelolaan kawasan hutan kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membentuk areal pariwisata berbasis lingkungan. Strategi agar penetapan areal pariwisata terlegitimasi, maka gerakan ini mendorong Gubernur Bangka Belitung untuk meresmikan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata. Pada tanggal 27 Juli 2017 pada akhirnya Gubernur Kepulauan Bangka Belitung meresmikan areal Mangrove Kurau Barat sebagai Ekowisata Mangrove Munjang Kurau (wawancara dengan anggota kelompok HKM Gempa 01 pada 21 Agustus 2020).

Perjuangan untuk membentuk Ekowisata Mangrove Munjang Kurau belum berhenti, Kelompok HKM Gempa 01 perlu pendanaan dari pemerintah dalam menjalankan program pengembangan. Agar pemerintah tidak mengubah perencanaan awal kelompok maka kelompok membentuk *Masterplan* selama 3 tahun dan mengajukan MoU kepada pemerintah. *Masterplan* tersebut tentu saja harus berdasarkan keputusan kelompok dan tidak merusak infrastruktur yang telah dibentuk. Hal inilah yang menjadi dasar bagi kelompok untuk menolak pendanaan pemerintah yang tidak sesuai dengan perencanaan pengembangan mangrove.

Tindakan pemerintah memberikan izin dan pendanaan bagi pengembangan kawasan ekowisata kepada kelompok HKM Gempa 01 di atas merupakan bentuk kuasa yang dijelaskan oleh Andrain (1992) bahwasannya kekuasaan dapat di raih melalui basis pengetahuan. Kelompok dalam hal ini memiliki basis kuasa pada pengetahuan pengembangan dan legalitas dalam hal tata kelola kawasan mangrove. Atas kedua basis kekuasaan tersebut pada akhirnya kelompok dapat mempengaruhi pemerintah untuk turut serta dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan pariwisata.

2) Kelompok HKm Gempa 01 Membatasi akses Masyarakat serta Menggandeng Pemuda Desa Kurau Barat melakukan Konservasi Lingkungan

Tindakan konservasi Mangrove di Desa Kurau Barat menurut Ketua HKm Gempa 01 telah dilakukan sejak 2005. Konservasi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hutan mangrove sekitar desa Kurau Barat. Pada 2005 menurut aparat Desa Kurau Barat kawasan Mangrove di Desa Kurau Barat dapat dikatakan mulai rusak akibat tindakan pengabaian yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Konservasi yang dilakukan awalnya merupakan swadaya masyarakat sekitar yang memiliki komitmen untuk merawat kawasan mangrove. Strategi konservasi yang dilakukan yaitu dengan cara memanfaatkan kearifan lokal, membentuk kelompok masyarakat berjumlah kurang lebih 10 orang, serta menanam dan merawat mangrove. Ketua HKm Gempa 01 memilih anggota melalui sistem kekerabatan serta pemuda masyarakat yang ada di sekitar desa Kurau Barat (wawancara dengan anggota kelompok HKm Gempa 01 pada 21 agustus 2020).

Langkah lanjut yang dilakukan setelah penanaman mangrove, kelompok mulai membatasi akses masyarakat untuk masuk kawasan Mangrove (wawancara dengan pemerintah desa Kurau Barat pada 4 September 2020). Pembatasan tersebut bukan tanpa alasan, menurut penjelasan ketua HKm Gempa 01, Prilaku masyarakat yang menebang pohon di areal mangrove dianggap merusak. Atas dasar itu maka penting untuk dilakukan pembatasan akses agar lingkungan mangrove tetap lestari (wawancara dengan ketua kelompok HKm Gempa 01 pada 21 agustus 2020).

Strategi konservasi yang dilakukan dianggap berhasil karena kawasan Mangrove Munjang Kurau memiliki setidaknya 40 jenis mangrove. Konservasi tersebut dilakukan secara bertahap hingga setidaknya memunculkan tempat konservasi Udang, Kepiting, ikan, burung, kera dan satwa lainnya. Saat ini tahun 2020 setidaknya kawasan Mangrove Munjang Kurau terjaga ekosistemnya dan menjadi acuan bagi pengembangan kawasan mangrove lain di Bangka Belitung (wawancara dengan pemerintah desa Kurau Barat pada 4 september 2020).

Selain menjadi acuan bagi daerah lain, Munjang Kurau saat ini menjadi penyuplai bibit mangrove bagi daerah sekitar. Berikut merupakan data produksi dan distribusi Mangrove Munjang Kurau:

**Table 1 Produksi dan Distribusi Mangrove Kawasan Munjang Kurau**

No		Rhizophora Apiculata	Rhizophora Mucronata	Rhizophora Stylosa	Jumlah
1	<b>Februari</b>				
	Produksi	1.700	1.000	1.000	3.700
	Distribusi	-	-	-	-
2	<b>Maret</b>				
	Produksi	11.300	10.000	10.000	31.300
	Distribusi	-	-	-	-
3	<b>April</b>				
	Produksi	5.250	3.000	3.000	11.250
	Distribusi	4.000	2.800	1.000	7.800
4	<b>Mei</b>				
	Produksi	-	-	-	-
	Distribusi	500	10.000	-	10.500

5	<b>Juni</b>				
	Produksi	8.750	2.500	2.500	13.750
	Distribusi	6.200	5.000	10.000	21.200
6	<b>Juli</b>				
	Produksi	5.000	10.000	5.000	20.000
	Distribusi	5.000	-	-	5.000

Sumber: BPDASHAL Baturusa Cerucuk

- 3) Kelompok HKm Gempa 01 memberikan nilai Edukasi dan Jasa Lingkungan Mangrove kepada Wisatawan  
 Kelompok HKm Gempa 01 secara sadar melakukan tindakan edukasi dan jasa lingkungan kepada wisatawan. Tindakan sadar tersebut ditandai dengan adanya fasilitas jembatan dan perahu sebagai sarana bagi wisatawan untuk berkeliling areal mangrove. Berikut merupakan gambar sarana untuk edukasi dan jasa lingkungan bagi wisatawan di Kawasan Mangrove Munjang Kurau.



Gambar 3 Sarana untuk Edukasi di Mangrove Munjang Kurau

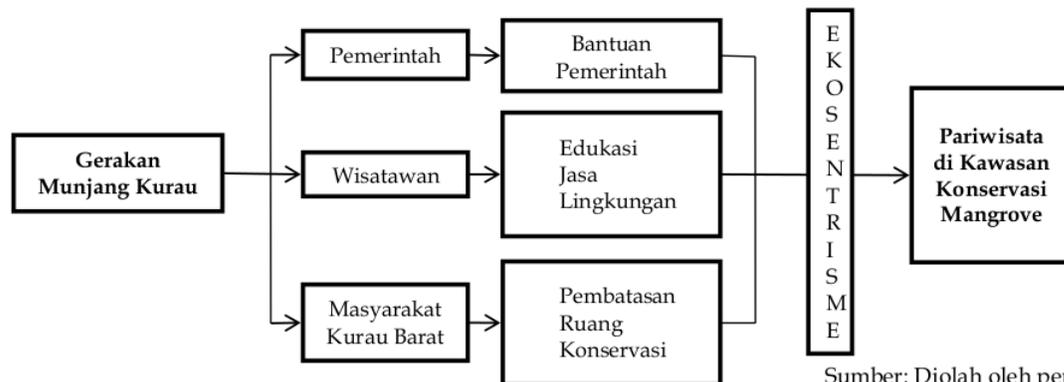
Edukasi yang ditanamkan yaitu berkaitan dengan habitat mangrove hingga jenis satwa yang dikembangkan. Pengunjung juga langsung dapat berinteraksi serta melihat langsung ekosistem yang ada di kawasan mangrove (wawancara dengan wisatawan pada tanggal 21 Agustus 2020). Sedangkan dari sisi jasa lingkungan, kelompok HKm Gempa 01 juga memproduksi mangrove serta diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk membagikan bibit mangrove kepada masyarakat yang ingin menanam.

Pengalaman pariwisata yang di tanamkan kepada pengunjung tentunya memberi pengaruh dalam aksi penyelamatan lingkungan di Bangka Belitung. Sebut saja saat ini keberhasilan pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Munjang Kurau menimbulkan efek bagi beberapa masyarakat pesisir di Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Bangka untuk mengelola Mangrove (wawancara dengan wisatawan pada tanggal 21 Agustus 2020).

Efek tersebut dapat dijelaskan sebagai bentuk dari teori kuasa yang dijelaskan oleh Dahl (1978) bahwasannya seseorang dapat dipengaruhi dalam kesadaran sukarela. Kelompok HKm Gempa 01, secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat melalui edukasi dan jasa lingkungan. Kegiatan tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi masyarakat Bangka Selatan, Bangka Barat dan Bangka yang secara tidak sadar bergerak untuk menyelamatkan lingkungannya.

## 5. Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan gambaran bahwa Kelompok HKm Gempa 01 memiliki Strategi atau skema dalam pengelolaan pengembangan pariwisata Mangrove Munjang yang sesuai dengan etika Ekosentrisme. Skema strategi yang dikembangkan oleh Kelompok HKm Gempa 01 setidaknya mengikutsertakan tiga *stakeholders* penting yaitu Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, Masyarakat sebagai pelaksana tata kelola, serta wisatawan sebagai objek edukasi pelestarian lingkungan. berikut merupakan skema Strategi yang dijalankan oleh Kelompok HKm Gempa 01 untuk mengelola pariwisata mangrove berbasis ekosentrisme:



Gambar 4 Strategi Gerakan Pariwisata Munjang Kurau Berbasis Ekosentrisme

Strategi di atas dilakukan oleh kelompok HKm Gempa 01 untuk menekan *stakeholders* dalam mengikuti pola berfikir pengelolaan pariwisata berbasis ekosentrisme. Penelitian ini akan menggunakan konsep kuasa milik Dahl (1978) yang menyatakan bahwasannya kekuasaan merupakan keahlian individu maupun kelompok yang dapat menggerakkan atau mempengaruhi tingkah laku objek, sehingga objek dapat mengikuti subjek. Selain itu Laswell (1948) juga menjelaskan berkenaan dengan kuasa merupakan tindakan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana (*who get what, when and how*).

Teori kuasa dapat menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Kelompok HKm Gempa 01 mulai dari tahun 2005 hingga saat ini 2020 dapat mempengaruhi ketiga *stakeholders* untuk turut serta dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan sekaligus melakukan pelestarian lingkungan pesisir di Kabupaten Bangka Tengah. Kelompok HKm Gempa 01 memiliki *Bargaining Power* berupa pengetahuan dalam pengembangan Mangrove. Hal inilah yang kemudian memberikan nilai kuasa kepada Kelompok HKm Gempa 01 untuk mempengaruhi ketiga *stakeholders* dalam mewujudkan pelestarian lingkungan berbasis perilaku ekosentrisme.

Selain teori kuasa, dalam penelitian ini juga menggunakan teori Gerakan Sosial yang ditawarkan oleh Sidney Tarrow. Gerakan sosial menurut Sidney Tarrow (1998) yaitu adanya tantangan kolektif, pemahaman tujuan bersama, solidaritas sosial dan interaksi yang berkelanjutan. Teori ini setidaknya mampu menjelaskan berkenaan dengan cara kelompok HKM Gempa 01 mempengaruhi pemerintah, Wisatawan, dan Masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan Mangrove Munjang Kurau dalam mewujudkan perilaku ekosentrisme.

Kelompok HKM Gempa 01 memberikan pemahaman tujuan bersama dengan cara menekan (*Pressure*) ketiga *stakeholders* untuk ikut dalam alur berfikir pelestarian lingkungan berbasis perilaku ekosentrisme yang merupakan ide awal dari gerakan pengelolaan kawasan tersebut. Ketiga *Stakeholders* tidak diberikan ruang untuk mengelola kawasan mangrove Munjang Kurau tanpa persetujuan kelompok, hal tersebutlah yang kemudian menguatkan kelompok untuk memunculkan satu tujuan bersama. Ketika seluruh *stakeholders* telah memahami tujuan bersama dalam pelestarian lingkungan yang dicanangkan maka terbentuk solidaritas sosial untuk mengarah (*Driving*) kepada tujuan bersama dan merubah (*Transforming*) perilaku antroposentrisme menjadi perilaku ekosentrisme dalam hal pengelolaan Kawasan Mangrove Munjang Kurau.

## 6. Simpulan

Stigma Provinsi Bangka Belitung sebagai daerah yang mengalami degradasi lingkungan saat ini berubah akibat munculnya pengelolaan pariwisata Mangrove Munjang Kurau. Pengelolaan pariwisata Mangrove Munjang Kurau digerakkan oleh Kelompok HKM Gempa 01. Kelompok HKM Gempa 01 memiliki ide awal gerakan yaitu sebagai penyelamatan lingkungan pesisir di Desa Kurau Barat Kabupaten Bangka Tengah. Gerakan penyelamatan lingkungan yang awalnya dilakukan secara swadaya saat ini mampu menjadi percontohan bagi daerah lain untuk mengembangkan kawasan Mangrove. Gerakan penyelamatan lingkungan yang dilakukan oleh HKM Gempa 01 setidaknya saat ini merupakan implementasi dari perilaku ekosentrisme.

Keberhasilan pengelolaan kawasan Mangrove Munjang Kurau berbasis perilaku ekosentrisme yang dilakukan tidak lepas dari Strategi yang dikembangkan oleh Kelompok HKM Gempa 01. Adapun strategi pengelolaan kawasan yang dilakukan oleh Kelompok HKM Gempa 01 melibatkan tiga *Stakeholders* yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Wisatawan. Gerakan dengan pendekatan penekanan (*Pressure*), dan Mengarahkan (*Steering*) ketiga *Stakeholders* berhasil untuk Merubah (*Transforming*) perilaku antroposentrisme menjadi perilaku ekosentrisme dalam hal pengelolaan kawasan Mangrove Munjang Kurau.. Kelompok HKM Gempa 01 berhasil menggiring ketiga *Stakeholders* sekaligus menjadikan kelompok mereka sebagai aktor utama dalam pengelolaan kawasan mangrove Munjang Kurau. Tahapan berikut setelah terjadi kesepakatan tujuan adalah keselarasan perilaku dalam pengelolaan kawasan yang melibatkan seluruh *Stakeholders*. Singkatnya bahwa kelompok ini berhasil menjadi memainkan peran kunci dalam pengelolaan kawasan Munjang Kurau.

## Daftar Pustaka

Andini, D. E., Guskarnali, & Irvani. (2019). Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Bahari di Pulau Panjang dan Pulau Tinggi Kabupaten Bangka Selatan.

- IKRA-ITH ABDIMAS, 2(3), 101-107. Retrieved from <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/view/593>
- Andrain, Charles F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arfan, A., Umar, R., & Fauzi, K. (2017). Peranan Pemerintah, Masyarakat dan Strategi Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove di Tongke Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Jurnal Sainsmat*, 6(2), 107-115. doi:<https://doi.org/10.35580/sainsmat6264602017>
- Citra, I. P. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 31-41. doi:<http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.8484>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Della-Porta, D., & Diani, M. (1999). *Social Movements: An Introduction*. Oxford: Blackwell.
- Dwi Saputra, K. C. (2019). Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove Munjang di Desa Kurau Barat Kabupaten Bangka Tengah. *Akuatik (Jurnal Dumber Daya Perairan)*, 31.
- Elmer, Robert A. (1978). *Modern Political Analysis*. New Dehi: Prentice-Hall of India.
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). *Prosiding Seminar Nasional Unimmus. 1*, pp. 517-529. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Ferdiansyah, R. (2019, Desember 29). *Konflik Tambang Laut di Babel Rugikan Nelayan Kecil*. Retrieved Januari 13, 2020, from *Media Indonesia*: <https://mediaindonesia.com/read/detail/280344-konflik-tambang-laut-di-babel-rugikan-nelayan-kecil>
- Gunn, C. A., & Turgut, V. (2002). *Tourism Planning: Basic Concept Cases*. New York: Routledge.
- Husin, H., Silalahi, S., Kartono, H., & Indra, T. L. (2001). Wilayah Potensial Wisata Bahari di Kabupaten Belitung. *Makalah Lepas Pada Program Magister Ilmu Geografi. Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia*, 1-16. Retrieved from <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/tito.latif/publication/belitung.pdf>
- Kantona, I., Adi, W., & Kurniawan. (2016). Potensi Kesesuaian Lokasi Wisata Selam Permukaan Snorkling sebagai Pengembangan Wisata Bahari Pantai Turun Aban Kabupaten Bangka. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, 10(2), 22-29. Retrieved from <https://journal.ubb.ac.id/index.php/akuatik/article/view/339>
- Kerap, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- kompas.com. (2020, Maret 01). *kompas.com*. Retrieved November 06, 2020, from *Penuhi Kriteria, Empat Event Babel Lolos CoE Wonderful Indonesia 2020*: <https://regional.kompas.com/read/2020/03/01/18040381/penuhi-kriteria-empat-event-babel-lolos-coe-wonderful-indonesia-2020?page=all>
- Kurniawan, Supriharyono, & Sasongko, D. P. (2014). Pengaruh Kegiatan Penambangan Timah terhadap Kualitas Air Laut di Wilayah Pesisir Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Akuatik: Jurnal Sumber Daya Perairan*, 8(1), 13-21. Retrieved from <https://journal.ubb.ac.id/index.php/akuatik/article/view/967>
- Lasswell, H. D. (1948). *Power and Personality*. New York: WW Norton.

- 5  
Martuti, N. K., Susilowati, S. M., Sidiq, W. A., & Mutatari, D. P. (2018). Peran Kelompok Masyarakat dalam Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Pesisir Kota Semarang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 100-114. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/jwl.6.2.100-114>
- 2  
Megawandi, Y. (2020). Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pendekatan Whole of Government. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1(2), 108-119. Retrieved from <http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/27>
- 11  
Nurhidayati, S. E. (2015). Studi Evaluasi Penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai Pendukung Agrowisata Berkelanjutan. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 28(1), 1-10. doi:<http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V28I12015.1-10>
- 30  
Tarrow, S. (1998). *Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- 8  
Valeriani, D. (2010). Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Equity*, 1(4).
- 12  
Wahyuni, H. (2013). Kandungan Logam Berat pada Air, Sedimen dan Plankton di Daerah Penambangan Masyarakat Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* (pp. 489-494). Semarang: Universitas Diponegoro. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/40714/>
- 35  
1  
Wahyuni, S., Sulardiono, B., & Hendrarto, B. (2015). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya. *Diponegoro Journal Of Maquares*, 4(4), 66-72.
- 22  
Walhi. (2018, April 04). *Hari Bumi, Babel Darurat Bencana Ekologi*. Retrieved Januari 04, 2020, from WALHI: <https://www.walhi.or.id/hari-bumi-babel-darurat-bencana-ekologi>
- 23  
Wijaya, T. (2019, 06 16). *mongabay.co.id*. Retrieved from Timah yang Membuat Wajah Bangka Tidak Bahagia: <https://www.mongabay.co.id/2019/06/16/timah-yang-membuat-wajah-bangka-tidak-bahagia/>
- 32  
Wilson, J. (1973). *Introduction Social Movements*. New York: Basic Books.

# Strategi Gerakan Pariwisata Mangrove dalam Mewujudkan Perilaku Ekosentrisme

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journal.ubb.ac.id">journal.ubb.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://ejournal.iwi.or.id">ejournal.iwi.or.id</a> Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	1%
4	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://ejournal2.undip.ac.id">ejournal2.undip.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.ut.ac.id">repository.ut.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://society.fisip.ubb.ac.id">society.fisip.ubb.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://mediaindonesia.com">mediaindonesia.com</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://sinta3.ristekdikti.go.id">sinta3.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://redfame.com">redfame.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://research-report.umm.ac.id">research-report.umm.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://ejurnal.bppt.go.id">ejurnal.bppt.go.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://travel.kompas.com">travel.kompas.com</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://jurnal.dpr.go.id">jurnal.dpr.go.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://kilasdaerah.kompas.com">kilasdaerah.kompas.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://regional.kompas.com">regional.kompas.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://journal.ugm.ac.id">journal.ugm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %

22	<a href="https://insightsociety.org">insightsociety.org</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://www.wijatnikaika.id">www.wijatnikaika.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://jurnal.uns.ac.id">jurnal.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://babel.kemenkumham.go.id">babel.kemenkumham.go.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://ejournal.unkhair.ac.id">ejournal.unkhair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://pbxpo.com">pbxpo.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://sim.ihdn.ac.id">sim.ihdn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://ecum.unicam.it">ecum.unicam.it</a> Internet Source	<1 %
31	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
32	<a href="http://ejournals.epublishing.ekt.gr">ejournals.epublishing.ekt.gr</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %

<1 %

34

[garuda.ristekbrin.go.id](http://garuda.ristekbrin.go.id)

Internet Source

<1 %

35

[repository.unika.ac.id](http://repository.unika.ac.id)

Internet Source

<1 %

36

[journal.uny.ac.id](http://journal.uny.ac.id)

Internet Source

<1 %

37

[repository.lppm.unila.ac.id](http://repository.lppm.unila.ac.id)

Internet Source

<1 %

38

Bambang Ari Satria, Hermianto Hermianto. "Collaborative Governance Dalam Program Perhutanan Sosial Pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung", Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 2020

Publication

<1 %

39

[bmcpublichealth.biomedcentral.com](http://bmcpublichealth.biomedcentral.com)

Internet Source

<1 %

40

[halobelajarsesuatu.blogspot.com](http://halobelajarsesuatu.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

41

[repository.syekhnurjati.ac.id](http://repository.syekhnurjati.ac.id)

Internet Source

<1 %

42

[www.bangka.us](http://www.bangka.us)

Internet Source

<1 %

[www.sajogyo-institute.or.id](http://www.sajogyo-institute.or.id)

43

Internet Source

<1 %

44

www.tandfonline.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off



Exclude matches 18 Aug 2022